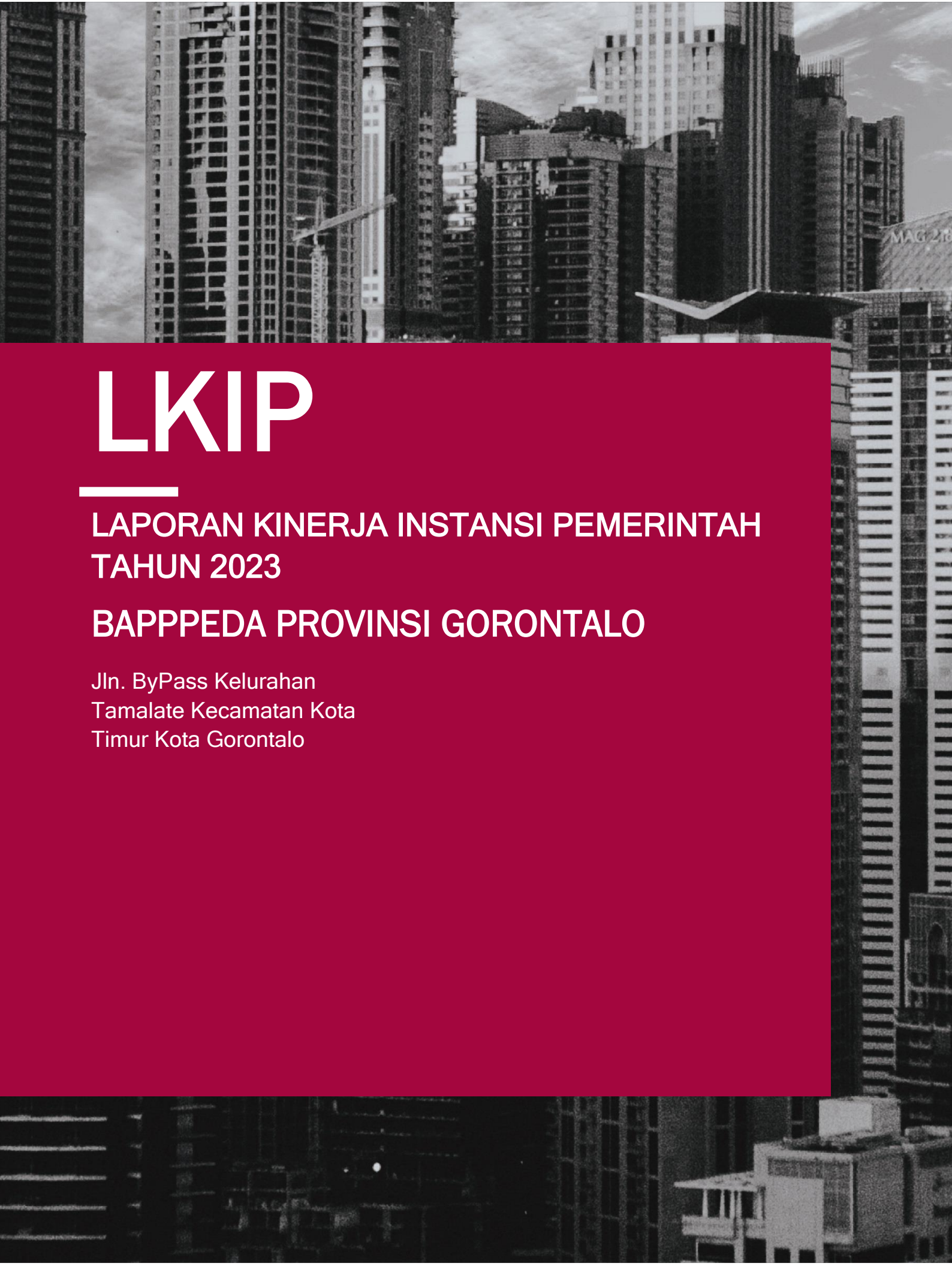




# LKIP

---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023**

**BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO**

Jln. ByPass Kelurahan  
Tamalate Kecamatan Kota  
Timur Kota Gorontalo

# Laporan Kinerja 2023

## Kata Pengantar

Puji syukur hanya patut dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan sajian secara utuh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyusunan laporan kinerja ini, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama seluruh staf sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya pengukuran kinerja program/kegiatan ini dapat menumbuhkan lebih baik lagi semangat motivasi dan semangat kerjasama semua staf dalam menjalankan dan menyukseskan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Maret 2024

Pt Kepala Badan Perencanaan  
Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Provinsi Gorontalo



Budiyanto Sidiki, S. Sos., M.Si  
NIP 197403111993011001

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedda) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan capaian kinerja Bappedda selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2023. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tahun 2023-2026 dan merupakan tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedda) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis. Berikut matriks Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedda:

Tabel 1  
Matriks SS dan IKU Bappedda 2023

| Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja Utama                                 | Target |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan        | Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026 | 100%   |
|                                                  | Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD     | 100%   |
|                                                  | Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD           | 100%   |
| Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                    | 4      |
|                                                  | Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan          | 2      |

|                                                            |                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</b> | <b>BB (73,00)</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|

Pencapaian Nilai Sasaran Strategis dari masing-masing SS dan IKU tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan**

Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:

- Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026. Target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga nilai yang dihasilkan adalah 100%
- Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD, dengan target yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi yang diperoleh sebesar 100%, dengan capaian 100%
- Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD, target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100% dengan capaian 100%

### **Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi**

Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:

- Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan target 4 Kajian, realisasi 4 Kajian, sehingga capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%
- Jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan. Target yang ditetapkan adalah 2 inovasi, realisasi di tahun 2023 adalah 2 inovasi dengan capaian 100%.

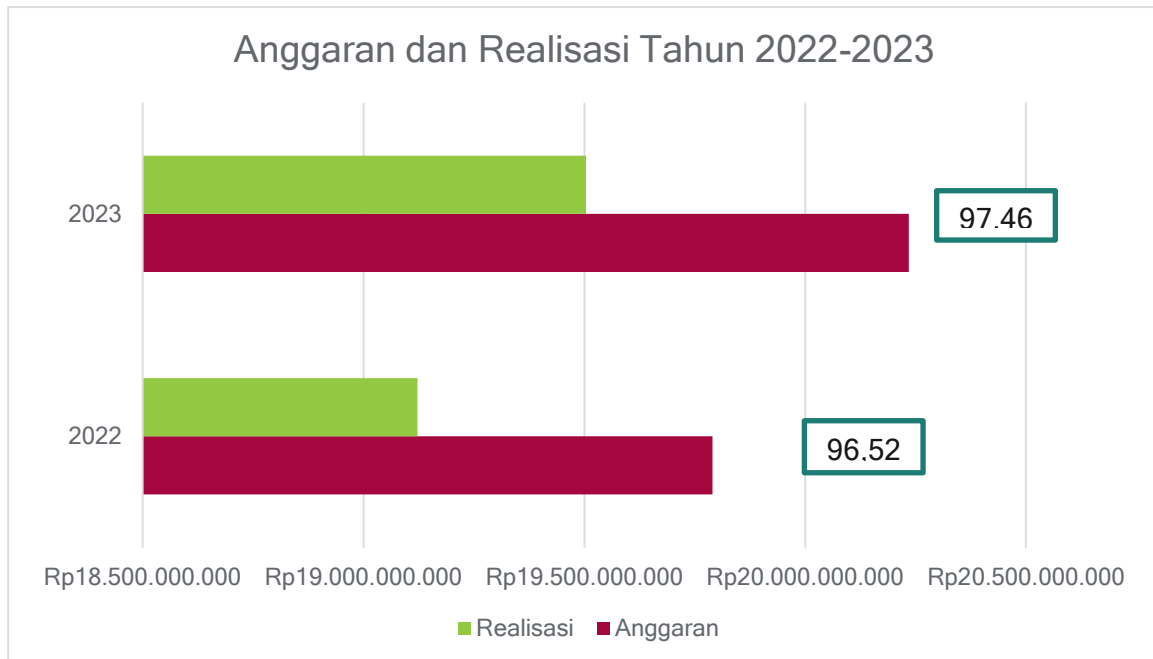
### **Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan IKU:

- Predikat Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah, target yang ditetapkan adalah BB dengan nilai 73, realisasi yang diperoleh adalah Kategori B dengan perolehan nilai 80,05. Dengan capaian adalah 109,66%

Dari segi penyerapan anggaran, pada tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp. 19.509.338.376 (97,46%). Perolehan ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 96,21%, dimana mengalami kenaikan sebesar 1,25%.

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2022-2023



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar                                                                                                                                        | i  |
| Executive Summary                                                                                                                                     | ii |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                                     | 1  |
| A. Latar Belakang                                                                                                                                     | 1  |
| B. Struktur Organisasi                                                                                                                                | 4  |
| C. Tugas dan Fungsi                                                                                                                                   | 5  |
| D. Cascading Kinerja                                                                                                                                  | 6  |
| E. Isu Strategis                                                                                                                                      | 7  |
| F. Keadaan Pegawai                                                                                                                                    | 8  |
| G. Keadaan Sarana dan Prasarana                                                                                                                       | 14 |
| H. Keuangan                                                                                                                                           | 15 |
| I. Sistematika Penulisan                                                                                                                              | 16 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA                                                                                                             | 19 |
| A. Rencana Strategis                                                                                                                                  | 19 |
| 1. Visi dan Misi                                                                                                                                      | 19 |
| 2. Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                 | 20 |
| 3. Strategi dan Arah Kebijakan                                                                                                                        | 21 |
| B. Rencana Kerja Tahun 2023                                                                                                                           | 22 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023                                                                                                                      | 28 |
| D. Inovasi yang dikembangkan                                                                                                                          | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                                                                                                                         | 36 |
| A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo                                                                                                         | 36 |
| 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023                                                                                        | 37 |
| 2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa tahun yang lalu                                                                     | 42 |
| 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 45 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan                          | 48 |
| 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran                                                                                            | 52 |
| 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja                                             | 52 |
| B. Realisasi Anggaran                                                                                                                                 | 54 |
| C. Penghargaan yang diterima                                                                                                                          | 54 |
| BAB IV PENUTUP                                                                                                                                        | 56 |
| Daftar Lampiran                                                                                                                                       | 58 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu : “Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan”

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam perencanaan pembangunan daerah. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Bappeda, serta sebagai sarana untuk mendapatkan

masukan dari stake holder demi perbaikan kinerja Bappeda yang berkelanjutan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026, Bappeda Provinsi Gorontalo memprioritaskan pada peningkatan mutu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Anggaran berbasis kinerja menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Rencana Strategis lima tahunan tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) per tahun yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Bappeda dituntut

untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda sebagai subsistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Bappeda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan visi dan misi daerah serta menyesuaikan juga dengan tujuan dan sasaran strategis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menyusun satu laporan kinerja yang menyajikan secara utuh pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023.

## **B. Struktur Organisasi**

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana terlampir dalam Gambar Struktur Organisasi Bappeda berikut:

Gambar 1  
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo

Y. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



PJ. GUBERNUR GORONTALO,  
*[Signature]*  
HAMKA HENDRA NOER

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kinerja Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022, Bappeda Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah:

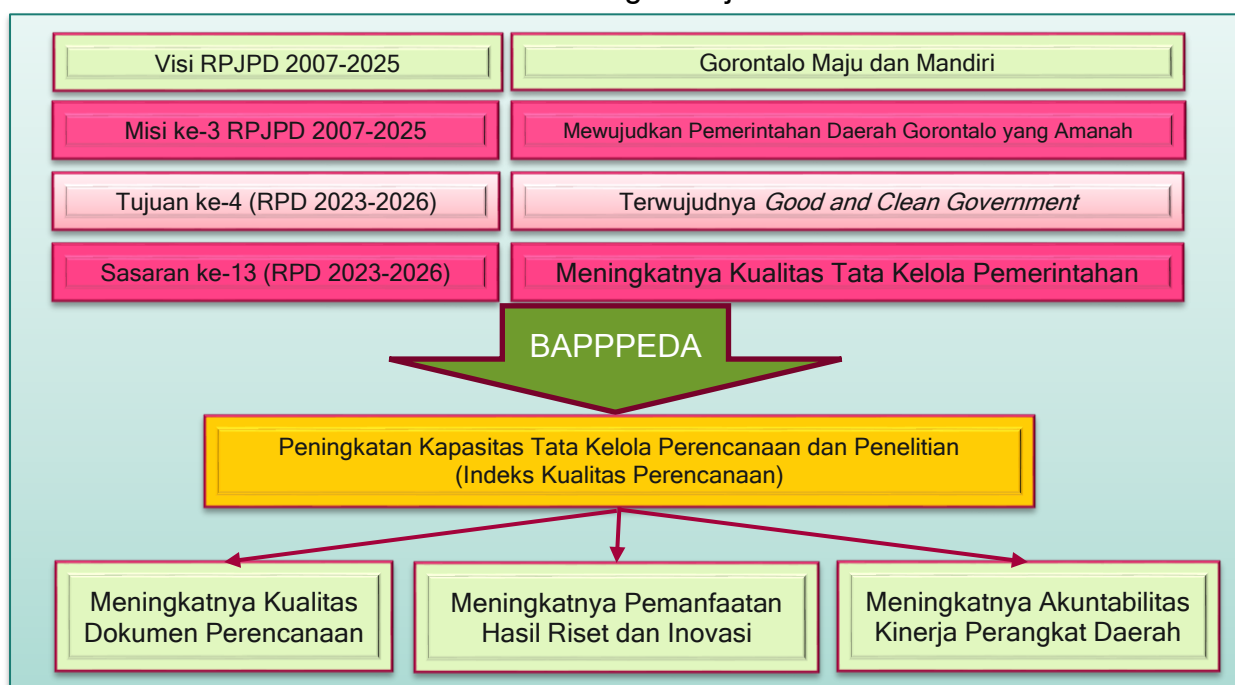
- merumuskan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan;
- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- melakukan pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas, dan harmonisasi RT/RW Daerah dan RPJMD;

- e. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrembang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- h. mengarahkan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- i. pengoordinasian dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah.

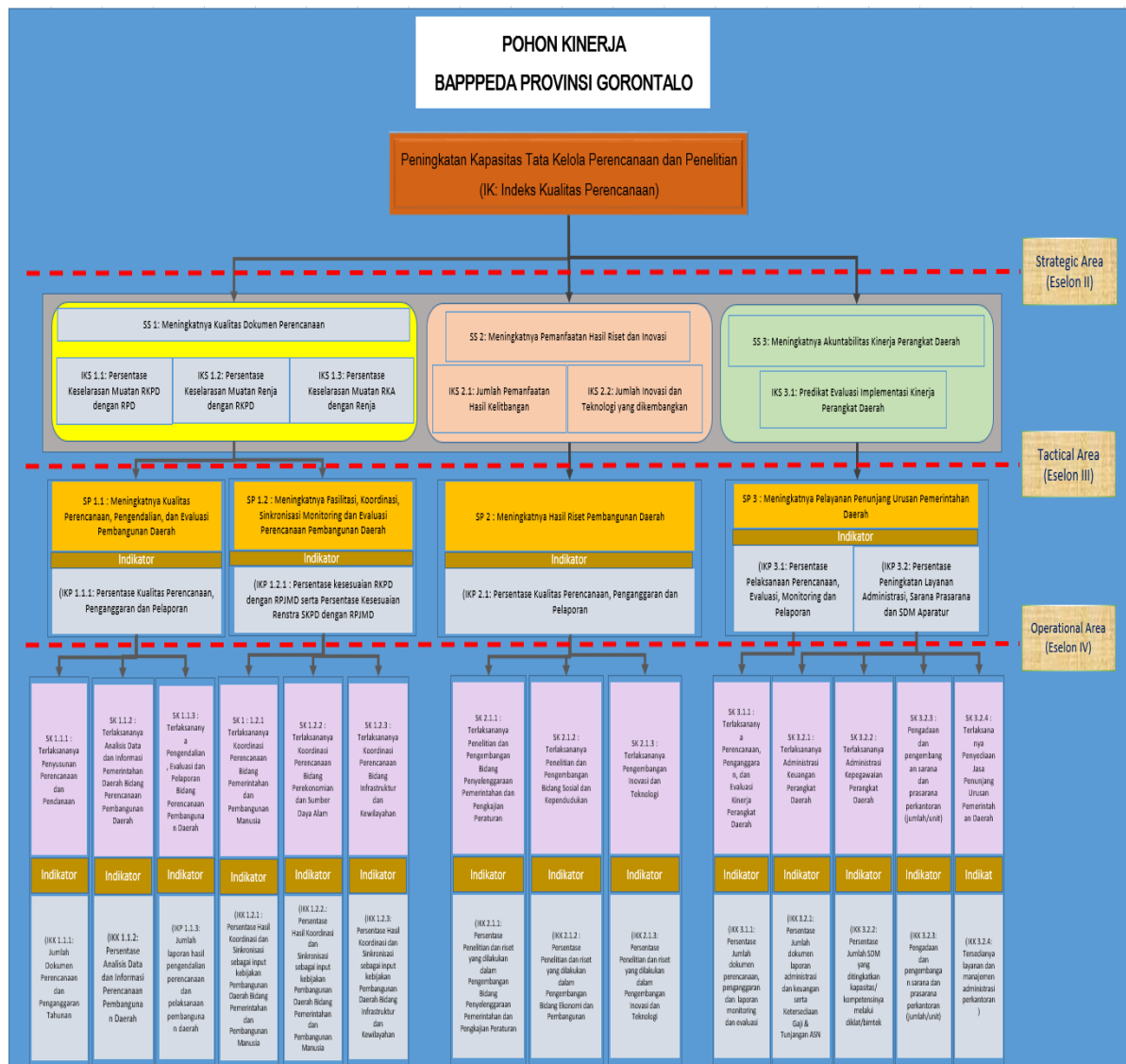
#### D. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut:

Gambar 2  
Cascading Kinerja



Gambar 2  
Pohon Kinerja



Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023, rumusan masalah Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dirumuskan dalam tabel dibawah berikut ini:

1. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian dalam proses penganggaran;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya hasil kajian yang disusun baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait untuk kebutuhan perencanaan daerah;
4. Belum optimalnya aplikasi pengendalian dan evaluasi dalam menghasilkan data kinerja pembangunan daerah sehingga berdampak pada kualitas dokumen perencanaan;
5. Masih terdapatnya ketidak konsistensian dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain.

7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkankurang efektifnya proses perencanaan;
10. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

Dari rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan isu strategis di Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
3. Oprimalisasi pemanfaatan hasil kajian dalam perencanaan daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengendalian dan evaluasi dalam menghasilkan data kinerja pembangunan daerah dalam konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain.
6. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan SDM Perencana
7. Penguatan Sumber Daya Anggaran dalam pengembangan SDM;
8. Penguatan kelembagaan perencanaan serta kualitas data dalam perencanaan pembagunan
9. Penyusunan dan penetapan standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

#### **F. Keadaan Pegawai**

Bappeda Provinsi Gorontalo secara keseluruhan didukung oleh 81 orang Pegawai Negeri Sipil dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang memiliki ketrampilan yang memadai serta potensi sumber daya manusia (SDM) yang handal sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo  
berdasarkan Komposisi Struktur Administrasi**

| No            | Komposisi Struktur Administrasi                                  | Jumlah          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1             | Kepala Badan                                                     | 1 Orang         |
| 2             | Sekretariat                                                      | 15 Orang        |
| 3             | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 14 Orang        |
| 4             | Bidang Perekonomian dan SDA                                      | 13 Orang        |
| 5             | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                      | 16 Orang        |
| 6             | Bidang Infrastruktur Kewilayahan                                 | 11 Orang        |
| 7             | Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah                        | 11 Orang        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                  | <b>81 Orang</b> |

*Sumber: Data Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian Bappeda tahun 2023*

Dari data sebagaimana table diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Gorontalo dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan, dan dibantu oleh pegawai yang tersebar di 1 (satu) unit kerja Sekretariat sebanyak 15 (enam belas) orang dan 6 (enam) unit kerja Bidang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai di Bappeda, pada umumnya berkualifikasi S1 bahkan terdapat beberapa yang memiliki kualifikasi S2 dan S3. Dari 82 (delapan puluh dua) pegawai di Bappeda terdapat 1 (satu) orang yang berkualifikasi pendidikan S3, dan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang sudah berkualifikasi S2, sementara 44 (empat puluh empat) orang lainnya berkualifikasi S1. Dan masih terdapat juga 5 (Lima) pegawai yang berkualifikasi Diploma 3, serta 3 (tiga) orang lainnya adalah SMA/Sederajat, sebagaimana tergambar dalam table berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo**  
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| <i>No</i>     | <i>Tingkat Pendidikan</i> | <i>Jumlah</i>   |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1             | Strata 3                  | 1 Orang         |
| 2             | Strata 2                  | 28 Orang        |
| 3             | Strata 1                  | 44 Orang        |
| 4             | Diploma / D3              | 5 Orang         |
| 5             | SMU / Sederajat           | 3 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>81 Orang</b> |



Sumber : Data Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian Bappeda tahun 2023

Selanjutnya profil kepegawaian Bappeda Provinsi Gorontalo jika dilihat berdasarkan komposisi pangkat dan golongan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat/golongan III sebesar 74,07% atau 60 (enam puluh) orang, dan 23,46% lainnya memiliki pangkat/golongan IV, serta 3,70% atau sebanyak 3 (tiga) masih berada pada pangkat/golongan II, sebagaimana table berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo**  
Berdasarkan Pangkat/Golongan

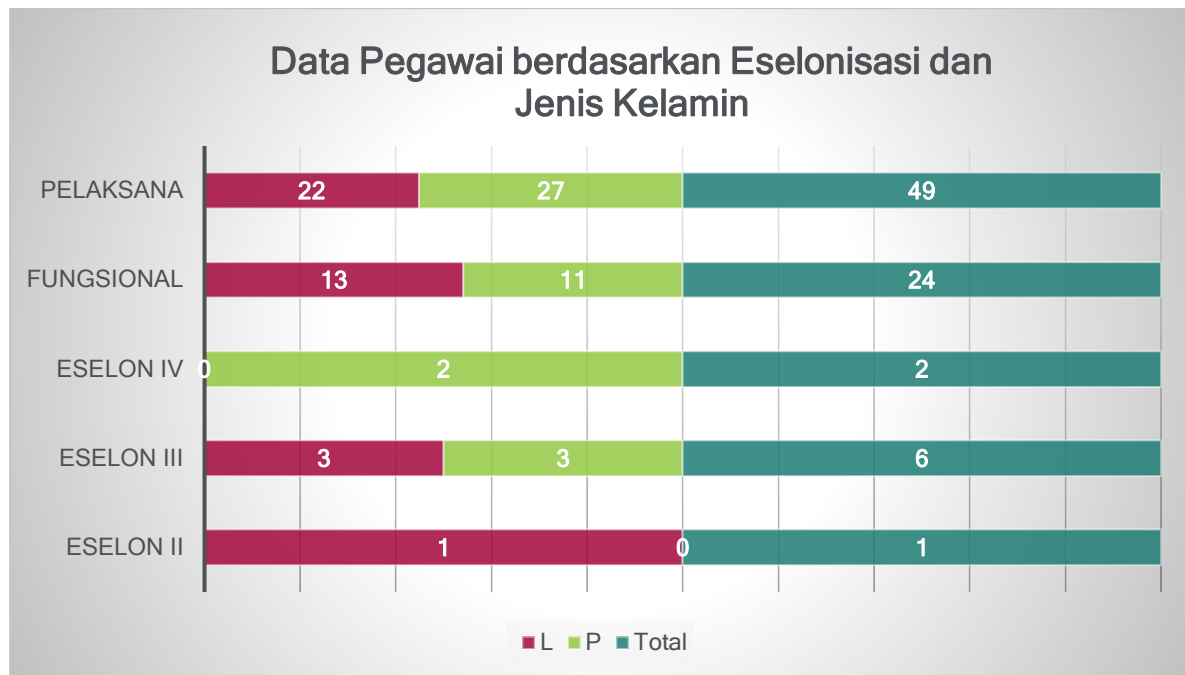
| <i>No</i>     | <i>Tingkat Golongan</i> | <i>Jumlah</i>   |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1             | IV / d                  | 1 Orang         |
| 2             | IV / c                  | 1 Orang         |
| 3             | IV / b                  | 7 Orang         |
| 4             | IV / a                  | 9 Orang         |
| 5             | III / d                 | 32 Orang        |
| 6             | III / c                 | 16 Orang        |
| 7             | III / b                 | 5 Orang         |
| 8             | III / a                 | 7 Orang         |
| 9             | II / d                  | 2 Orang         |
| 10            | II / c                  | 1 Orang         |
| 11            | II / b                  | 0 Orang         |
| 12            | II / a                  | 0 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>81 Orang</b> |



Sumber : Data Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian Bappeda tahun 2023

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Grafik 1 Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan Eselonisasi dan Jenis Kelamin**



Sumber: Data Kepegawaian pada Sub Bagian Kepegawaian Bappeda tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Bappeda Provinsi Gorontalo terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Bappeda Provinsi Gorontalo sebagian besar merupakan pegawai Golongan III. Selanjutnya untuk kesetaraan gender sudah menunjukkan keseimbangan dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan structural (Eselon) dan Fungsional sudah merata.

Secara umum kondisi sumber daya manusia pada Bappeda masih belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan dan penghitungan beban kerja, jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) pegawai tetapi baru terisi sebanyak 81 (delapan puluh satu) pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 90 (Sembilan puluh) pegawai. Dengan kondisi diharapkan bahwa pemenuhan pegawai dapat dilakukan melalui rekrutmen CPNS maupun PPPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi khususnya untuk formasi fungsional perencanaan.

## G. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda dirasa sudah cukup memadai dengan adanya pegawai sejumlah 81 orang dan 33 Tenaga Teknis. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Bappeda juga sudah cukup memadai, dimana Bappeda telah memiliki ruang aula yang digunakan sebagai tempat rapat-rapat koordinasi dengan kapasitas 200-250 orang mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda cukup tinggi, serta beberapa ruang rapat kecil lainnya yang tersebar di lantai 1 dan 2 Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Sarana Prasarana Bappeda Provinsi Gorontalo

| SARANA PRASARANA BAPPEDA PROVINSI GORONTALO<br>TAHUN 2022 |                                 |           |                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| NO                                                        | JENIS PERALATAN                 | JUMLAH    | KONDISI                       |
| 1                                                         | Alat – Alat Besar               | 1 Unit    | Baik                          |
| 2                                                         | Alat – Alat Angkutan            |           |                               |
|                                                           | a. Kendaraan Roda Empat         | 8 Unit    | Baik/Rusak Ringan             |
|                                                           | b. Kendaraan Roda Dua           | 23 Unit   | Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat |
| 3                                                         | Alat Kantor dan Rumah Tangga    |           |                               |
|                                                           | a. Peralatan Kantor             | 383 Unit  | Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat |
|                                                           | b. Peralatan Rumah Tangga       | 1150 Unit | Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat |
| 4                                                         | Alat Studio dan Alat Komunikasi |           |                               |
|                                                           | a. Peralatan Studio             | 152 Unit  | Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat |
|                                                           | b. Peralatan Komunikasi         | 12 Unit   | Baik                          |
| 5                                                         | Bangunan Gedung                 |           |                               |
|                                                           | a. Bangunan Gedung Kantor       | 3 Lantai  | Baik                          |
|                                                           | b. Rumah Genset                 | 1         | Baik                          |
| 6                                                         | Jaringan                        |           |                               |
|                                                           | a. Jaringan SIMDA Keuangan      | 1         | Baik                          |
|                                                           | b. Jaringan Telkomsel           | 1         | Baik                          |

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 22 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 4 unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 85-100 orang pegawai, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang sehingga masih diperlukan pengembangan untuk pemenuhannya.

#### **H. Keuangan**

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Pada anggaran murni tahun 2023 Bappeda Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.891.553.200,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 17.009.046.200,- yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 9.498.161.855; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.510.884.345; dan Belanja Modal Rp 882.507.000,- . Pada perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 20.234.546.900,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 19.311.289.900,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.754.611.555,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.556.678.345,- dan Belanja Modal sebesar Rp 923.257.000,-. yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 4 (empat) program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Grafik 2

Struktur Anggaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Sumber: Data Keuangan pada Sub Bagian Keuangan Bappeda tahun 2023

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

## Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal Bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## Lampiran

# BAB II

# PERENCANAAN

# DAN PERJANJIAN

# KINERJA

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi:

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo telah disusun dan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Gorontalo No. 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD tersebut telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Provinsi Gorontalo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

##### 1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan sasaran; Strategi dan arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup. Sehubungan dengan hal tersebut maka Rencana Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 pada Bab IV hanya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Provinsi Gorontalo yang diturunkan dari RPJPD 2007-2025. Adapun Visi Misi dimaksud adalah “Gorontalo Maju dan Mandiri”.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Bappeda Provinsi Gorontalo berada pada misi ke 5 yaitu mewujudkan tata pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah.

Tabel 2.1

Ringkasan Visi dan Misi RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| Visi                              | Misi (RPJPD<br>2007-2025)                          | Tujuan (RPD<br>2023-2026)             | Indikator<br>Tujuan                                                                                 | Sasaran                                        | Indikator<br>Sasaran        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                 | 2                                                  | 3                                     | 4                                                                                                   | 5                                              | 6                           |
| <b>Gorontalo Maju dan Mandiri</b> | Mewujudkan Pemerintah Daerah Gorontalo yang Amanah | Terwujudnya Good and Clean Governmenr | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai MCP</li> <li>• Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul> | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Kualitas Perencanaan |

Sumber: RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

## 2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan tiga belas pada misi kelima RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu mewujudkan pemerintah daerah Gorontalo yang amanah, melalui tujuan terwujudnya Good and Clean Governmentl dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

### 1) Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo

Tujuan yang dicapai selama periode Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah “Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian.”

### 2) Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2023-2026 dapat dirumuskan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
- b. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bappeda Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan indikator kinerja masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| Tujuan                                                       | Sasaran                                   | Indikator Kinerja                                       | Target Kinerja Sasaran      |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              |                                           |                                                         | Kondisi Awal Renstra (2022) | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian |                                           | Indeks Kualitas Perencanaan                             | -                           | 3 (Skala 1-5) | 3 (Skala 1-5) | 4 (Skala 1-5) | 4 (Skala 1-5) |
|                                                              | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan | Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026 | -                           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|                                                              |                                           | Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD     | 75%                         | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|                                                              |                                           | Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD           | -                           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
|                                                              | Meningkatnya pemanfaatan                  | Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                    | 3                           | 4             | 4             | 5             | 5             |

|                                                     |                                                       |            |            |            |            |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Hasil Riset dan Inovasi                             | Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dikembangkan        | 2          | 2          | 2          | 2          | 3         |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | BB (72,64) | BB (73,00) | BB (74,00) | BB (75,00) | A (80-90) |

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, maka disusunlah strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

#### 1) Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas setiap tahun selama periode 2023-2024 adalah:

- Meningkatnya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan dan sector
- Meningkatkan Riset/Kajian/Inovasi berbasis prioritas daerah serta penguatan kelembagaan penelitian
- Meningkatnya budaya kinerja BERAKHLAK dan peningkatan akuntabilitas kinerja

#### 2) Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

- Penguatan asistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan
- Optimalisasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi
- Memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- Penguatan kelembagaan (TKPKD, SDGs, dll)
- Penguatan fasilitas pelaksanaan dan evaluasi riset daerah
- Penyusunan strategi dan kebijakan penelitian daerah berbasis rencana pembangunan daerah
- Mendorong pemanfaatan inovasi daerah
- Optimalisasi kerja sama penelitian dengan mitra pembangunan
- Peningkatan kualitas SDM
- Pengendalian pengawasan

k. Penguatan implementasi proses bisnis

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| Tujuan                                                              | Sasaran                                             | Strategi                                                                                               | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian</i> | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | Meningkatnya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan dan sector | a. Penguatan asistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan<br>b. Optimalisasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi<br>c. Memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia<br>d. Penguatan kelembagaan (TKPKD, SDGs, dll)                                               |
|                                                                     | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | Meningkatkan Riset/Kajian/Inovasi berbasis prioritas daerah serta penguatan kelembagaan penelitian     | a. Penguatan fasilitas pelaksanaan dan evaluasi riset daerah<br>b. Penyusunan strategi dan kebijakan penelitian daerah berbasis rencana pembangunan daerah<br>c. Mendorong pemanfaatan inovasi daerah<br>d. Optimalisasi kerja sama penelitian dengan mitra pembangunan |
|                                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Budaya Kerja BerAKHLAK dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja                              | a. Peningkatan Kualitas SDM<br>b. Pengendalian Pengawasan<br>c. Penguatan Implementasi Proses Bisnis                                                                                                                                                                    |

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| Urusan/Bidang<br>Urusan/Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                          | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) |                |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                          |                                                                                                                            | Target                             | Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1                                                        | 2                                                                                                                          | 3                                  | 4              | 5           |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                      |                                                                                                                            |                                    |                |             |
| PERENCANAAN                                              |                                                                                                                            |                                    |                |             |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI    | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan<br><br>Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, | 100%                               | 13.610.072.697 | APBD        |

|                                                                                                                           |                                                                                                              |                  |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                           | <b>Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b>                                                                     |                  |                      |             |
| <b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                | <b>Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Monitoring dan Evaluasi</b>               | <b>100%</b>      | <b>1.075.432.000</b> | <b>APBD</b> |
| a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | 2 Dokumen        | 917.943.000          | APBD        |
| b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | 1 Laporan        | 157.489.000          | APBD        |
| <b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Persentase Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan serta Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b> | <b>100%</b>      | <b>9.568.151.877</b> | <b>APBD</b> |
| a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Provinsi Gorontalo                                                     | 84 Orang         | 9.498.152.655        | APBD        |
| b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD                                              | Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semester tahun berjalan                                                      | 3 Laporan        | 69.999.222           | APBD        |
| <b>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui Diklat/Bimtek</b>                 | <b>100%</b>      | <b>500.655.372</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya                                                | 1 Paket          | 82.128.000           | APBD        |
| b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya                                                       | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                       | 84 Orang         | 418.527.372          | APBD        |
| <b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>Persentase Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>                                            | <b>100%</b>      | <b>1.494.756.800</b> | <b>APBD</b> |
| a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan                                                       | 8 Paket          | 1.494.756.800        | APBD        |
| <b>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>                                            | <b>100%</b>      | <b>971.076.648</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                      | Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran                                                                 | 1 Laporan        | 971.076.648          | APBD        |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                 | <b>Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD</b>                                                               | <b>100%</b>      | <b>1.048.461.555</b> | <b>APBD</b> |
|                                                                                                                           | <b>Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD</b>                                                       |                  |                      |             |
| <b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                            | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan</b>                                                   | <b>1 Dokumen</b> | <b>448.952.480</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Koordinasi penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                    | 1 Dokumen        | 448.952.480          | APBD        |
| <b>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                           | <b>Persentase Analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah</b>                    | <b>100%</b>      | <b>287.532.707</b>   | <b>APBD</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                        |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| a. Analisis Data dan Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                                   | Jumlah Dokumen hasil<br>Analisis Data untuk<br>penyusunan kebijakan<br>perencanaan<br>pembangunan daerah                                                               | 1 Dokumen              | 287.532.707          | APBD        |
| <b>3. Pengendalian, Evaluasi, dan<br/>Pelaporan Bidang<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah</b>                                     | <b>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengendalian<br/>Perencanaan dan<br/>Pelaksanaan<br/>Pembangunan Daerah di<br/>Provinsi</b>                                                | <b>100%</b>            | <b>311.976.368</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Koordinasi Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah di<br>Provinsi                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                                  | 2 Laporan              | 143.372.168          | APBD        |
| b. Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penyusunan Laporan<br>Berkala pelaksanaan<br>pembangunan daerah                                       | Jumlah laporan hasil<br>evaluasi kinerja<br>pembangunan daerah                                                                                                         | 3 Laporan              | 168.604.200          | APBD        |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN<br/>SINKRONISASI PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                     | <b>Persentase Kesesuaian<br/>RKPD dengan RPJMD</b><br><br><b>Persentase Kesesuaian<br/>Renstra SKPD dengan<br/>RPJMD</b>                                               | <b>100%</b>            | <b>2.098.651.832</b> | <b>APBD</b> |
| <b>1. Koordinasi Perencanaan<br/>Bidang Pemerintahan dan<br/>Pembangunan Manusia</b>                                                  | <b>Persentase Hasil<br/>Koordinasi dan<br/>Sinkronisasi sebagai<br/>input kebijakan<br/>pembangunan daerah<br/>Bidang Pemerintahan<br/>dan Pembangunan<br/>Manusia</b> | <b>100%</b>            | <b>759.157.572</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD, dan<br>RKPD)           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>bidang pemerintahan<br>daerah yang dikoordinir<br>penyusunannya<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD)                           | 1 Dokumen              | 12.375.000           | APBD        |
| b. Asistensi penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>pembangunan perangkat<br>daerah bidang<br>pemerintahan                              | Jumlah perangkat<br>daerah yang<br>mendapatkan asistensi<br>dalam penyusunan<br>Renstra/Renja bidang<br>pemerintahan                                                   | 5 Perangkat<br>Daerah  | 85.302.972           | APBD        |
| c. Pelaksanaan monitoring<br>dan evaluasi penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>pembangunan perangkat<br>daerah bidang<br>pemerintahan | Jumlah perangkat<br>daerah yang<br>mendapatkan monitoring<br>dan evaluasi dalam<br>penyusunan<br>Renstra/Renja bidang<br>pemerintahan                                  | 5 Perangkat<br>Daerah  | 85.550.000           | APBD        |
| d. Koordinasi pelaksanaan<br>sinergitas dan harmonisasi<br>perencanaan bidang<br>pemerintahan                                         | Jumlah laporan hasil<br>sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pembangunan<br>Pemerintahan                                                  | 1 Laporan              | 65.652.000           | APBD        |
| e. Koordinasi penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>pembangunan daerah<br>bidang pembangunan<br>manusia (RPJPD, RPJMD,<br>dan RKPD)    | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan daerah<br>bidang pembangunan<br>manusia yang dikoordinir<br>penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD, dan RKPD)                     | 2 Dokumen              | 71.142.400           | APBD        |
| f. Asistensi penyusunan<br>dokumen perencanaan<br>pembangunan perangkat<br>daerah bidang<br>pembangunan manusia                       | Jumlah perangkat<br>daerah yang<br>mendapatkan asistensi<br>dalam penyusunan<br>Renstra/Renja bidang<br>pembangunan manusia                                            | 14 Perangkat<br>Daerah | 119.537.200          | APBD        |
| g. Pelaksanaan monitoring<br>dan evaluasi penyusunan                                                                                  | Jumlah perangkat<br>daerah yang                                                                                                                                        | 14 Perangkat<br>Daerah | 188.002.000          | APBD        |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                    |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia                                                | mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia                                           |                    |                    |             |
| h. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan daerah              | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia                                       | 2 Laporan          | 131.596.000        | APBD        |
| <b>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>                                                  | <b>Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b> | <b>100%</b>        | <b>646.734.000</b> | <b>APBD</b> |
| a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian daerah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)              | 2 Dokumen          | 210.141.900        | APBD        |
| b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian                               | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian                                   | 8 Perangkat Daerah | 19.967.500         | APBD        |
| c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian     | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian                     | 8 Perangkat Daerah | 17.396.000         | APBD        |
| d. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian                                       | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang perekonomian                                              | 1 Laporan          | 204.128.910        | APBD        |
| e. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)           | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)           | 1 Dokumen          | 28.615.950         | APBD        |
| f. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam                           | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang sumber daya alam                               | 8 Perangkat Daerah | 34.036.000         | APBD        |
| g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang sumber daya alam                 | 8 Perangkat Daerah | 57.410.000         | APBD        |
| h. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam                | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang sumber daya alam                                          | 2 Laporan          | 75.038.000         | APBD        |
| <b>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                      | <b>Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan pembangunan daerah</b>                                          | <b>100%</b>        | <b>692.760.000</b> | <b>APBD</b> |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                         | <b>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                                                           |                    |                      |             |
| a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur daerah yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)           | 3 Dokumen          | 105.034.000          | APBD        |
| b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur                           | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur                                | 7 Perangkat Daerah | 26.000.000           | APBD        |
| c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur                  | 7 Perangkat Daerah | 26.940.000           | APBD        |
| d. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang Infrastruktur                                   | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                           | 1 Laporan          | 257.611.000          | APBD        |
| e. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)             | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)              | 1 Dokumen          | 73.628.000           | APBD        |
| f. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan                             | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan                                  | 8 Perangkat Daerah | 17.900.000           | APBD        |
| g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan   | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan                    | 8 Perangkat Daerah | 26.940.000           | APBD        |
| h. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan                  | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan                                             | 2 Laporan          | 158.707.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                       | <b>Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti</b>                                                                                    | <b>100%</b>        | <b>1.134.367.116</b> | <b>APBD</b> |
| <b>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                      | <b>Persentase Penelitian dan Riset yang dilakukan dalam pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b> | <b>100%</b>        | <b>355.187.100</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                           | Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang dikelola                                                                           | 1 Dokumen          | 355.187.100          | APBD        |
| <b>2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial</b>                                                         | <b>Persentase Penelitian dan Riset yang dilakukan dalam pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial</b>                                    | <b>100%</b>        | <b>204.955.100</b>   | <b>APBD</b> |
| a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial                                                                | Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial                                                            | 1 Dokumen          | 204.955.100          | APBD        |

|                                                                                                      |                                                                                                                        |             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                 | <b>Persentase Penelitian dan Riset yang dilakukan dalam pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                | <b>100%</b> | <b>296.832.400</b> | <b>APBD</b> |
| a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan                                     | Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Pangan                              | 1 Dokumen   | 83.494.900         | APBD        |
| b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan                                         | Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan                                         | 1 Dokumen   | 134.216.300        | APBD        |
| c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup                                               | Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup                                               | 1 Dokumen   | 79.121.200         | APBD        |
| <b>4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                         | <b>Persentase Penelitian dan Riset yang dilakukan dalam pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                         | <b>100%</b> | <b>277.392.516</b> | <b>APBD</b> |
| a. Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif | Jumlah laporan Hasil diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif | 1 Laporan   | 179.382.244        | APBD        |
| b. Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan                                                | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan                                | 1 Laporan   | 98.010.272         | APBD        |

Sumber: Renja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Tujuan                            | Sasaran                                   | Indikator                                               | Target |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026 | 100%   |

|   |                            |                                                     |                                                       |                         |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Perencanaan dan Penelitian |                                                     | Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD   | 100%                    |
|   |                            |                                                     | Persentase Keselarasan Muatan RKA OPD dengan RKPD     | 100%                    |
|   |                            | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                  | 4 Hasil Kajian          |
|   |                            |                                                     | Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dikembangkan        | 2 Inovasi dan Teknologi |
| 3 |                            | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | BB (73,00)              |

Sumber: Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mendapat dukungan APBD sebesar Rp. 18.021.672.505,- sebesar Rp. yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dengan 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan, namun pada bulan Oktober Tahun 2023, Bappeda Provinsi Gorontalo terjadi rasionalisasi anggaran pada Perubahan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 namun tidak berdampak pada perubahan kinerja baik indicator maupun target di tahun 2023. Perubahan APBD Tahun 2023 anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo menjadi Rp. 20.234.546.900,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan

| No | Sasaran Strategis                                | Program                                                            | Anggaran (Rp)     |                   | Selisih (Rp) |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |                                                  |                                                                    | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan |              |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan        | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.048.461.555     | 1.090.701.555     | 42.240.000   |
|    |                                                  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.935.050.232     | 2.467.521.832     | 532.471.600  |
| 2  | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah                 | 1.625.861.116     | 2.356.551.116     | 730.690.000  |

|        |                                                     |                                       |                |                |               |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 13.915.723.997 | 14.319.772.397 | 404.048.400,  |
| Jumlah |                                                     |                                       | 18.525.096.900 | 20.234.546.900 | 1.709.450.000 |

Sumber: Rencana Kerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Selain itu terdapat sumber anggaran APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1.550.680.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) program, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Bappeda Provinsi Gorontalo yang bersumber dari APBN

| No     | Sasaran Strategis                         | Program                                           | Anggaran (Rp) |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan | Program Perencanaan Pembangunan Nasional          | 1.346.264.000 |
|        |                                           | Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan dan Desa | 204.416.000   |
| Jumlah |                                           |                                                   | 1.550.680.000 |

Berdasarkan table alokasi anggaran dilihat dari sumbernya, maka total anggaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 21.785.226.900 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8

Total APBD/APBN Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023

| No    | Sasaran Strategis                                   | Anggaran (Rp)  |               | Jumlah         |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|       |                                                     | APBD           | APBN          |                |
| 1     | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | 3.558.223.387  | 1.550.680.000 | 5.108.903.387  |
| 2     | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | 2.356.551.116  | -             | 2.356.551.116  |
| 3     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 14.319.772.397 | -             | 14.319.772.397 |
| Total |                                                     | 20.234.546.900 | 1.550.680.000 | 21.785.226.900 |

Sumber: Rencana Kerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

#### D. Inovasi yang dikembangkan

Dalam rangka mencapai target kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bappeda Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

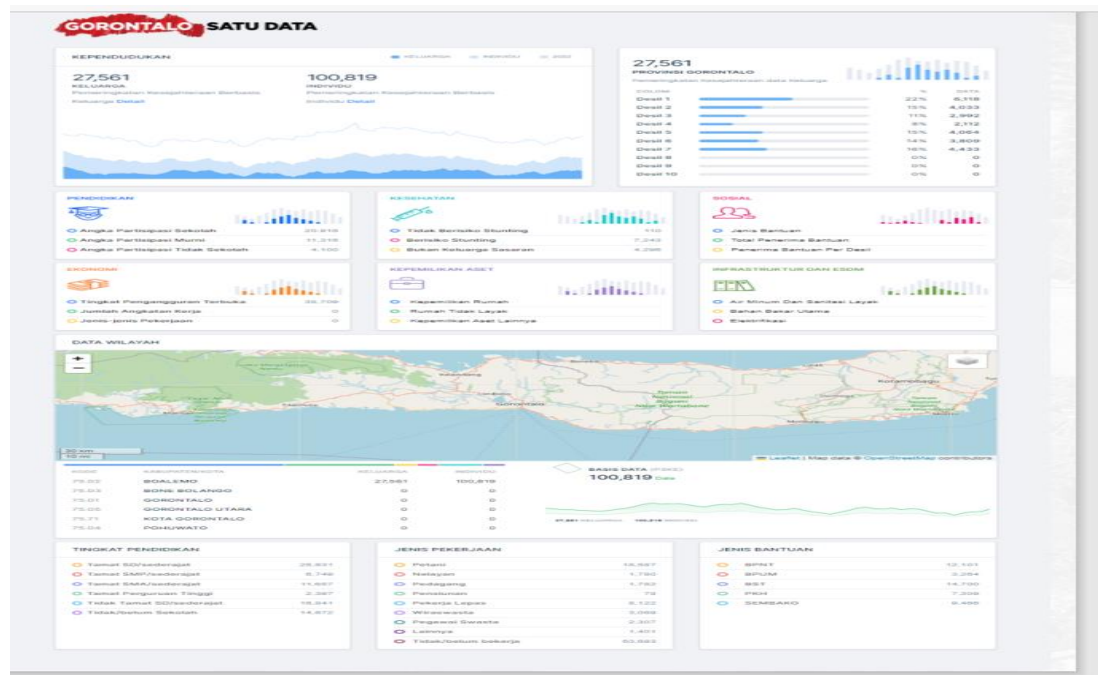
##### 1. Sistem Informasi Perencanaan

Sistem Informasi Perencanaan (<http://bappedagorontalo.gov.id>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Pengembangan aplikasi Bappeda memberikan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun yang selalu mengalami peningkatan.

##### 2. Aplikasi Elektronik Gorontalo Satu Data (e-GSD)

Aplikasi Elektronik Gorontalo Satu Data (e-GSD) adalah sistem elektronik Pendataan dan Pemutakhiran Data dan Informasi sosial, ekonomi Rumah Tangga dan Individu serta informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 1  
Dashboard Aplikasi E-GSD

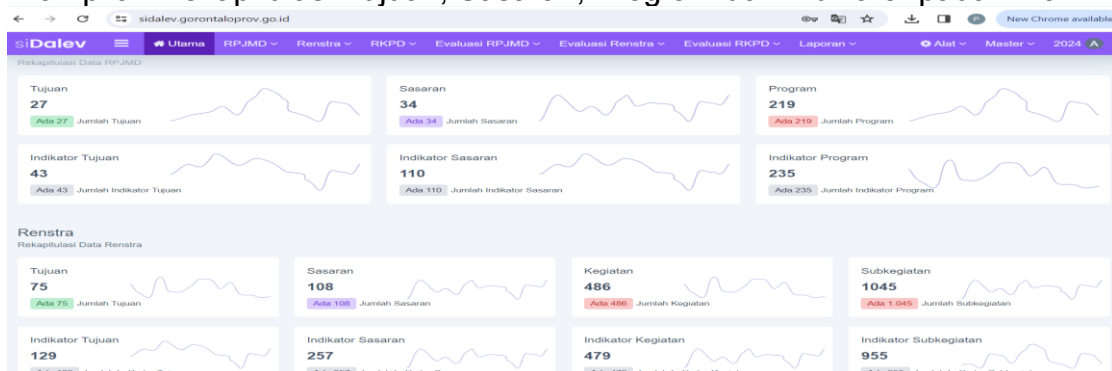


Sumber: Portal Gorontalo Satu Data

### 3. Aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Si-Dalev (Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi)

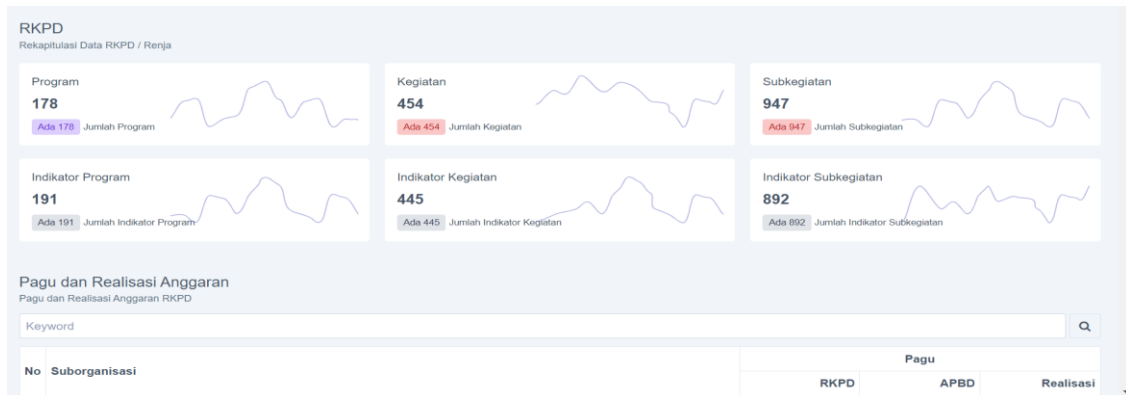
*Si-Dalev* adalah suatu sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yang dapat menjamin kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan kemudahan dalam memberikan catatan dan rekomendasi secara institusi dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi bisa lebih cepat, serta terdokumentasi dengan baik.

Gambar 2  
Tampilan Rekapitulasi Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator pada RPJMD



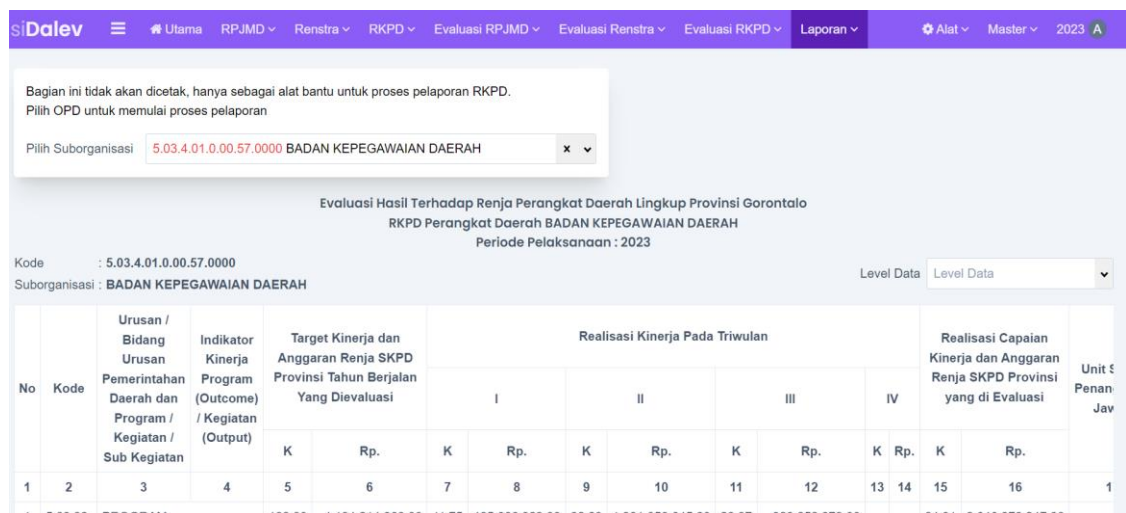
Gambar 3

### Tampilan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator pada RKPD



Gambar 4

### Tampilan Laporan Evaluasi RKPD per OPD



Gambar 5

### Tampilan Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran per OPD



Sumber: Aplikasi Si-Dalev Bappeda Provinsi Gorontalo

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo

Bappeda Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya dijadikan sebagai gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo serta mengidentifikasi sebagai tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh berdasarkan kategorisasi penilaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Kriteria      | Interval Realisasi (%) | Kode        |
|----|---------------|------------------------|-------------|
| 1  | Sangat Baik   | 91 (= 100              | Hijau Tua   |
| 2  | Tinggi        | 76 (= 90               | Hijau Muda  |
| 3  | Sedang        | 66 (= 75               | Kuning Tua  |
| 4  | Rendah        | 51 (= 65               | Kuning Muda |
| 5  | Sangat rendah | (= 50                  | Merah       |

*Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017*

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis, dan evaluasi capaian kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor perencanaan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| No | Tujuan Strategis                      | Indikator Kinerja          | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Capaian Tahun 2026 | Proyeksi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | Realisasi              | Capaian                | Kriteria/Kode |
|----|---------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Terwujudnya Good and Clean Government | MCP                        | Nilai  | 89,72                   | 98,51                     | 91,2                | 83                   | 83                | -<br>(belum diketahui) | -<br>(belum diketahui) |               |
|    |                                       | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai  | 63,90                   | 66,9                      | 64,5                |                      | 65,10             | -<br>(belum diketahui) | -<br>(belum diketahui) |               |

Sumber data: RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Salah satu tujuan strategis dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan provinsi Gorontalo adalah Terwujudnya Good and Clean Government dengan indikator kinerjanya adalah *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja MCP sebagaimana dalam tabel 3.2 menunjukkan bahwa target tahun 2023 adalah sebesar Indeks 83. Angka pada target ini merupakan hasil realisasi tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi target tahun 2023 berdasarkan arahan Tim Itjen Kemendagri dan KPK RI pada saat pelaksanaan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur pada waktu lalu, sehingga menyebabkan perbedaan target dalam dokumen RPD Provinsi Gorontalo dengan proyeksi sebesar 92,65. Adapun hasil realisasi tahun 2023 sampai dengan sekarang masih pada tahap penilaian oleh Tim atas kelengkapan bukti dukung yang diperkirakan akhir bulan Januari tahun 2023 akan di rilis hasilnya.

Untuk Reformasi Birokrasi (RB) terdapat strategi baru dalam Road Map RB 2022-2024 yaitu RB Tematik yang merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan langsung oleh Masyarakat. Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota mengalami fluktuasi, namun demikian ada 2 daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato selama kurun waktu 5 tahun ini indeksnya naik terus.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut, pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Capaian Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

| Tujuan Strategis                                             | Indikator Kinerja           | Satuan | Target        | Realisasi                | Persentase | Kriteria | Ket |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------------------------|------------|----------|-----|
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian | Indeks Kualitas Perencanaan | %      | Predikat Baik | 87,64<br>(Predikat Baik) | 88         | Baik     |     |

Tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo memiliki satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaiannya yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan target yang ditetapkan adalah Predikat Baik. Tahun 2023 menjadi tahun pertama pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan atau disebut dengan IKP sejak ditetapkan menjadi indikator jangka menengah daerah. IKP ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana komponen utama dari penilaian IKP ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketercapaian hasil pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan untuk Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 87,64 dengan Predikat Baik dari target yang ditentukan. Pengukuran dilaksanakan oleh Bappenas RI yang telah disampaikan pada bulan Januari 2024.

Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                           | Satuan         | Target     | Realisasi | Persentase | Kriteria/ Kode |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | 1. Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026. | %              | 100%       | 100%      | 100        |                |
|    |                                                     | 2. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD      | %              | 100%       | 100%      | 100        |                |
|    |                                                     | 3. Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD            | %              | 100%       | 100%      | 100        |                |
| 2  | Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi                 | 4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                     | %              | 4 Kajian   | 9 Kajian  | >100       |                |
|    |                                                     | 5. Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang termanfaatkan          | Keg            | 2 Inovasi  | 3 Inovasi | >100       |                |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah    | Nilai/Predikat | BB (73,00) | A (80,05) | >100       |                |

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan capaian kinerja utama sebagai berikut:

1. Keberhasilan Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD di wujudkan melalui menjaga konsistensi program yang ditetapkan dalam RPD sebanyak 152 jumlah program yang kemudian ini menjadi acuan untuk perumusan penetapan program dalam RKPD. Selain itu menjamin jumlah 14 sasaran kinerja daerah dan jumlah 44 indikator dan target sasaran yang ditetapkan dalam RPD juga menjadi bagian yang terdapat didalam RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil pengendalian rumusan rencana pembangunan daerah.
2. Keberhasilan Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD di wujudkan melalui :
  - menjamin jumlah 14 sasaran dalam RKPD yang kemudian menjadi acuan dalam perumusan jumlah 56 sasaran dan 117 indikator sasaran dalam Renja OPD tahun 2023.
  - menjaga konsistensi jumlah 206 program yang ada dalam RKPD yang kemudian itu di rumuskan ke dalam Renja OPD sebanyak 163 program berdasarkan hasil pengendalian perencanaan selama perumusan RKPD dan Renja OPD tahun 2023.
3. Keberhasilan indikator Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD diwujudkan melalui:

- menjaga konsistensi jumlah 206 program, 178 indikator program dan 140 target program yang ada dalam RKPD menjadi bagian dari kegiatan yang terdapat dalam RKA Perangkat Daerah.
- menjamin jumlah 174 program, 133 indikator program dan 110 target program yang ada dalam RKA OPD sebagai bagian dari jumlah 481 kegiatan dan 356 indikator kegiatan dalam RKPD berdasarkan hasil pengendalian rumusan rencana pembangunan daerah tahun 2023.

Secara umum pencapaian indikator kinerja konsistensi antar dokumen perencanaan menjadi semakin lebih baik karena telah adanya aplikasi SIPD yang salah satunya berfungsi untuk mengkompilasi data pembangunan daerah, menjaga konsistensi antara dokumen RPD dan RKPD serta Renstra OPD dan Renja OPD hingga ke RKA OPD sekaligus memberikan layanan penyediaan data untuk perumusan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sangat mendukung pencapaian konsistensi antar dokumen perencanaan.

4. Ketercapaian indikator Kemanfaatan Hasil Riset/Kajian dapat di lihat dari beberapa rekomendasi hasil riset/kajian yang menjadi referensi kebijakan perencanaan OPD pemerintah Provinsi maupun Kabupaten seperti terlihat pada kajian Pemanfaatan Teras Vegetasi di Lahan Miring untuk Produksi Tanaman Berkelanjutan, yang pemilihan jenis bantuan kepada masyarakat sekitar lokasi telah berdasarkan rekomendasi hasil kajian berupa pemberian bantuan benih di lahan-lahan miring diarahkan kepada jenis komoditi legume seperti kacang tanah untuk memperbaiki status hara tanah dan kebijakan bantuan pemerintah tidak hanya dalam bentuk benih dan pupuk, tetapi faktor lain yang penting seperti kapur dolomit sangat penting untuk dapat memperbaiki sifat tanah. Begitu juga dengan Kajian Awal Potensi Pengembangan Perikanan Tuna di Teluk Tomini, Gorontalo (Karakteristik Mutu Tangkapan dan Permasalahan Nelayan Kecil) yang rekomendasinya telah menjadi bahan pertimbangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo dalam merencanakan dan menyiapkan sumber daya guna

meningkatkan kualitas mutu tangkapan di provinsi Gorontalo. Jumlah riset/kajian yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah 9 buah.

5. Ketercapaian indikator Jumlah Inovasi dan Teknologi yang termanfaatkan dapat di lihat dari beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah. Tahun ini bidang Riset dan Inovasi melaksanakan kajian Analisis Nilai Ekonomi Pada Kontruksi Bangunan Rumah Dengan Menggunakan Bata Interlock Berbahan *Fly Ash Dan Botton Ash* (Faba) di Provinsi Gorontalo yang kemudian hasil dari kajian ini memberikan kontribusi pada inovasi dalam industri konstruksi dengan memanfaatkan limbah industri sebagai bahan baku utama. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah bata interlock dapat di gunakan untuk kontruksi rumah layak huni (Mahyani) yang tahan terhadap bencana. Pada tahun ini skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo adalah 44,63 dengan predikat Inovatif berada di peringkat 24 kategori provinsi.
2. **Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun yang Lalu**

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pemerintahan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

| Tujuan Strategis                      | Indikator Kinerja          | Realisasi/Tahun |       |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|-----------------|
|                                       |                            | 2021            | 2022  | 2023            |
| Terwujudnya Good and Clean Government | Nilai MCP                  | 89,72           | 83    | Belum diketahui |
|                                       | Indeks Reformasi Birokrasi | 66,23           | 69,61 | Belum diketahui |

Dari tabel diatas terlihat kenaikan capaian indeks RB di tahun 2021 ke 2022 dan kemungkinan kenaikan juga diyakini pada tahun 2023 jika melihat hasil implementasi RB Tematik yang di nilai baik oleh Kemenpan RB yaitu tematik pengentasan kemiskinan, tematik digitalisasi penanganan stunting, tematik pelayanan peningkatan investasi, tematik pengendalian inflasi dan tematik

peningkatan komitmen untuk penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Dalam pengendalian Inflasi Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan atas kinerjanya dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengentasan kemiskinan. Selain itu telah diterbitkan juga Surat Edaran Gubernur terkait kebijakan menggunakan produk lokal berupa sulaman karawo dan upiah karanji serta mendorong seluruh pengusaha hotel atau tamu yang ke Gorontalo untuk berbelanja UMKM lokal.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, terdapat tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo dengan satu indikator yang dapat di lihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu

| Tujuan Strategis                                             | Indikator Kinerja           | Satuan (%) | Capaian (%) |      |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                             |            | 2020        | 2021 | 2022                                              | 2023              |
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian | Indeks Kualitas Perencanaan |            | -           | -    | -<br>(93,78)*<br>Capaian IPPN Bappenas Tahun 2022 | 87,64**<br>(Baik) |

\* Sumber data : Laporan Pemutakhiran Hasil Kinerja Bappenas Tahun 2022

\*\* Sumber data : Hasil Penilaian IPPN 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo oleh Bappenas RI.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan angka Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 87,64 dengan predikat BAIK. Hal ini diukur berdasarkan aspek sinergitas, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja yang tentu saja melahirkan beberapa rekomendasi untuk menjadi panduan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas perencanaan di daerah pada proses perencanaan periode berikutnya.

Selain itu tindak lanjut rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan nilai masing-masing indikator IPPN yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi dapat menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah dalam upaya memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas dokumen perencanaannya. Dengan demikian, hasil penilaian dan rekomendasi ini bukan hanya menjadi sebuah laporan, tetapi sebuah langkah konkret menuju perbaikan dan keselarasan yang

lebih baik dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang lebih efektif, efisien serta terintegrasi.

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bappeda, capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo**  
**Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                          | 2021      |           | 2022      |            | 2023       |           |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |                                                     |                                                            | Target    | Realisasi | Target    | Realisasi  | Target     | Realisasi |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | 1. Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026 | 91,51%    | 100%      | 100%      | 100%       | 100%       | 100%      |
|    |                                                     | 2. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD     | 91,51%    | 100%      | 100%      | 100%       | 100%       | 100%      |
|    |                                                     | 3. Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD           | -         | -         | -         | -          | 100%       | 100%      |
| 2  | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | 4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                    | 100%      | 98,16%    | 100%      | 100%       | 4 Kajian   | 9 Kajian  |
|    |                                                     | 5. Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang termanfaatkan         | 2 Inovasi | 2 Inovasi | 2 Inovasi | 2 Inovasi  | 2 Inovasi  | 3 Inovasi |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah   | -         | 72,64     | 73,00     | BB (73,31) | BB (74,00) | A (80,05) |

Dari tabel tersebut di atas capaian setiap indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 dari aspek kualitas menunjukkan capaian yang sangat baik sebesar 100 % yang ditunjukkan melalui konsistenan pemilihan program, kegiatan, target kinerja dan indikator yang telah diatur melalui Kepmendagri nomor: 900.1.15.1.1317 Tahun 2023. Sedangkan dari aspek kuantitas masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti komitmen perangkat daerah dalam mengisi/menginput target indikator program dan kegiatan serta data dukung lainnya dalam SIPD maupun dalam dokumen perencanaan lainnya sehingga hal ini bisa diukur dan diketahui hasilnya.

Dalam tabel diatas juga terlihat indikator yang tidak terdapat datanya karena merupakan indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra 2023-2026 sehingga data sebelumnya tidak cukup tersedia.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pemerintah dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD

| No.                   | Tujuan Strategis                      | Indikator Kinerja          | Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (Target Tahun 2022) | Realisasi Tahun 2022 | Target RPD Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian (%) | Kriteria/ Kode |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 1                     | Terwujudnya Good and Clean Government | MCP                        | 89,72                                               | 91,2                                                      | 83                   | 92,65                 | -                    | -           |                |
|                       |                                       | Indeks Reformasi Birokrasi | 63,9                                                | 64,5                                                      | 69,61                | 65,61                 | -                    | -           |                |
| (-) : Belum diketahui |                                       |                            |                                                     |                                                           |                      |                       |                      |             |                |

Dari tabel tersebut di atas capaian indikator kinerja MCP dan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 belum diketahui menunggu rilis data hasil evaluasi Tim Itjen Kemendagri dan KPK serta Kemenpan RB.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah terdapat tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo yang realisasi kinerjanya dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

| Tujuan Strategis                                             | Indikator Kinerja           | Satuan | Target Renstra | Realisasi sampai dengan Tahun 2023 | Capaian (%)           | Kriteria/ Kode |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian | Indeks Kualitas Perencanaan | %      | Predikat Baik  | 87,64                              | 87,64 (Predikat Baik) |                |

Hasil yang ditunjukkan pada capaian sebagaimana dalam tabel diatas adalah predikat BAIK, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah. Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bappeda, terdapat sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo yang realisasi kinerjanya dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                           | Target Renstra Tahun 2023 | Realisasi sampai dengan Tahun 2023 | Capaian (%) | Kriteria/ Kode |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | 1. Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026. | 100 %                     | 100 %                              | 100         |                |
|    |                                                     | 2. Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD      | 100 %                     | 100 %                              | 100         |                |
|    |                                                     | 3. Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD            | 100 %                     | 100 %                              | 100         |                |
| 2  | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | 4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                     | 4 Hasil Kajian            | 9 Hasil Kajian                     | ≥ 100 %     |                |
|    |                                                     | 5. Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang termanfaatkan          | 2 Inovasi                 | 3 Inovasi                          | ≥ 100 %     |                |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah    | BB (73.00)                | A 80,05                            | ≥ 100 %     |                |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketercapaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis tahun 2023 yang sangat baik (terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian diatas target) sehingga diharapkan target jangka menengah hingga akhir periode tahun 2026 dapat tercapai.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Good and Clean Government dengan indikator kinerja MCP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Secara umum pencapaian nilai MCP dan Indeks RB rata-rata sudah bagus, walaupun ada beberapa perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Untuk kedua indikator capaian tahun 2023 belum di rilis pada awal tahun 2024 ini namun untuk MCP itu sendiri, area intervensi yang terus membutuhkan perbaikan sebagaimana hasil evaluasi MCP tahun 2022 menitikberatkan pada tata kelola pemerintah meliputi transparansi, proses yang jelas dan bersih, kelengkapan evidensi yang bisa dibuktikan sehingga solusinya dirasa perlu menkonfirmasi poin-poin yang perlu dibenahi dari area intervensi yang masih rendah dan melakukan perbaikan dari posisi proses sampai evidensi yang maksimal.

- b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan (IKP).

Hasil pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ( IPPN) yang di laksanakan oleh Bappenas baru awal tahun ini di sampaikan ke daerah yang sebelumnya diawal tahun juga Bappenas telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pengukuran IPPN/IPPD hasil ini menjadi acuan untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan K/L/D yang tentunya didalamnya terdapat beberapa rekomendasi perbaikan

- c. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan antara RKPD dengan RPD, Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RKA OPD dengan RKPD.

Secara umum tidak ada permasalahan dalam mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 yang dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional

(PN) sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 yang kemudian dilanjutkan pada RKP Nasional tahun 2023 dan telah menjadi rujukan tema visi misi RPD Provinsi Gorontalo 2023 - 2026.

Berikut keselarasan dukungan program terhadap prioritas nasional sebagaimana tabel dibawah ini:

| No | Prioritas Nasional                                                                | Jumlah Program yang mendukung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan        | 36                            |
| 2  | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan        | 11                            |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing                    | 20                            |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        | 11                            |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 8                             |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim    | 14                            |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik              | 19                            |
|    | Jumlah                                                                            | 119                           |

*(Nomenklatur program sebagai lampiran)*

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi telah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA OPD serta perumusan RKPD Kabupaten/Kota dengan telah melalui analisis permasalahan dan isu strategis serta koordinasi lintas sektor. Dalam pengukuran keselarasan sasaran dan program pada dokumen RKPD terhadap Renja dan RKA OPD telah menghasilkan persentase yang sangat baik karena telah dilakukan optimalisaasi pendampingan penginputan OPD pada sistem informasi yang digunakan didalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi serta menganalisis secara mendalam perhitungan kebutuhan anggaran secara efektif dan efisien untuk setiap kegiatan.

Namun demikian masih terdapat hal yang dirasa perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pengukuran IKU Bappeda tahun 2023 adalah pengisian data dukung dalam SIPD oleh petugas input OPD, karena didapati pada beberapa OPD ada variabel yang tidak ditemukan datanya seperti

indikator dan target kegiatan pada RKPD, target sasaran, indikator dan target program pada Renja OPD, serta target kegiatan pada RKA sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan.

d. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dengan indikator kinerja Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Untuk indikator kinerja ini secara pencapaian telah sangat baik terlihat dari hasil kajian/riset selama tahun 2023 yang termanfaatkan adalah sebanyak 9 kajian/riset melampaui dari target sebanyak 4 kajian/riset. Bentuk ketermanfaatan dapat dilihat dari adanya Dinas/Badan yang kemudian menjadikan hasil dan rekomendasi kajian/riset sebagai bahan konstruktif dalam perumusan kebijakan guna mendukung kualitas dokumen perencanaan berbasis riset. Capaian kinerja yang sangat baik ini juga dihasilkan melalui tindak lanjut hasil pelaksanaan Rakorda Kelitbangan yang secara komprehensif menginventarisir kebutuhan kajian/riset dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan.

Namun demikian beberapa hal yang masih menjadi kendala yaitu:

1. belum adanya evaluasi terhadap hasil kajian/riset yang sudah termanfaatkan sebelumnya untuk mengetahui keberlanjutannya
2. kurang dioptimalkannya bidang Litbang dalam pembahasan asistensi Renja OPD guna memberikan ruang yang lebih luas dalam penyusunan program dan kegiatan berbasis riset sehingga kajian/riset telah bersifat usulan kebutuhan OPD
3. terbatasnya SDM/Tenaga fungsional yang profesional.

Adapun Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada sehingga jika hal ini mendapat perhatian dan kebijakan Pimpinan diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam rangka menjamin ketermanfaatan hasil kajian/riset.

e. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi dan Teknologi yang termanfaatkan

Hasil capaian dari indikator kinerja ini salah satunya di dukung oleh telah diterbitkannya regulasi yang mendorong penerapan inovasi daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terhadap tingkat keberhasilan kinerja sasaran dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

### Analisis efisiensi Sumber Daya Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| No  | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                           | % Capaian Kinerja<br>( ) = 100 %) | Serapan Anggaran | Tingkat Efisiensi<br>(4)/(5)*100) |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|     |                                                     |                                                             |                                   | %                | %                                 |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                         | (4)                               | (5)              | (6)                               |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | 1. Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026. | 100                               | 98,17            | 101,86                            |
|     |                                                     | 2. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD      |                                   |                  |                                   |
|     |                                                     | 3. Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD            |                                   |                  |                                   |
| 2   | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | 4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                     | 100                               | 99,27            | 100,74                            |
|     |                                                     | 5. Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang termanfaatkan          | 100                               | 98,08            | 101,96                            |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah    | 100                               | 95,48            | 104,73                            |

Analisis efisiensi berdasarkan tabel 3.11 di atas, kinerja sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2022 menunjukkan tingkat efisiensi di atas 100%. Ini diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi dan efisiensi penggunaan sarana prasarana. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan juga ini telah memanfaatkan teknologi infomatika contoh rapat melalui zoom meetng, pengurangan cetak dokumen yang di ganti dengan penyampian secara soft file, mengotimalkan ruang rapat yang ada di kantor Bappeda, dll.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja maupun anggaran untuk masing-masing sasaran tentunya terdapat program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilannya.

Adapun program maupun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja maupun anggaran pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | PROGRAM / KEGIATAN                                                                       | PAGU (Rp)             | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan           | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                 | <b>1.090.701.555</b>  | - Adanya program Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengukuran SPIP yang menjadi motivasi pencapaian sasaran strategis /program tersebut                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                     | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                     | 470.072.480           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | 298.092.707           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | 322.536.368           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                | <b>2.467.521.832</b>  | - Adanya sejumlah apresiasi mengenai keberhasilan perencanaan pembangunan berkelanjutan dari aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, dan Infrastruktur dan Kewilayahan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah pusat/provinsi, LSM, masyarakat, swasta, BUMN/BUMD/BUM des, akademisi) yang menjadi motivasi pencapaian sasaran strategis / program tersebut. |
|    |                                                     | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | 1.011.639.572         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | 732.942.260           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | 722.940.000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi    | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                        | <b>2.356.551.116</b>  | - Terdapat program Innovation Government Awards (IGA) yang dilaksanakan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga kolaborasi dengan Perguruan Tinggi terkait dengan hasil-hasil kelitbitan yang menjadi motivasi pencapaian sasaran strategis /program tersebut                                                                                                                            |
|    |                                                     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 701.747.100           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | 439.955.100           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | 927.776.400           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | 287.072.516           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                             | <b>14.319.772.397</b> | Adanya target keberhasilan pencapaian Indeks RB dan Indeks SAKIP serta penetapan Zona Integritas dengan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi motivasi pencapaian sasaran strategis program tersebut                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 1.185.542.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 9.824.610.777         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 474.739.372           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 1.662.550.600         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 1.172.329.648         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     | <b>JUMLAH</b>                                                                            | <b>20.234.546.900</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## B. Realisasi Anggaran

Pagu APBD Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 20.234.546.900.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.504.338.376.- (96,39 %). Adapun pagu APBN sebesar Rp 1.543.780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.487.296.298.- (96,34 %)

Adapun rincian dan realisasi anggaran yang dikelola Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Operasi sebesar Rp 19.311.289.900.- dengan realisasi Rp. 18.611.949.132.- (95,86%)
2. APBD Belanja Modal sebesar Rp 923.257.000,- dengan realisasi Rp. 908.225.840.- (98,37%).

Anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15.

### Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per Sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo

| No. | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                           | Kinerja    |           |         | Anggaran       |                |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                |                                                             | Target     | Realisasi | Capaian | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|     |                                                                                |                                                             | (%/Jumlah) | %         | %       |                |                |             |
| 1   | 2                                                                              | 3                                                           | 4          | 5         | 6       | 7              | 8              | 9           |
| 1.  | Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Penelitian dan | 1. Presentasi Keselarasan Muatan RKPd dengan RPD 2023-2026. | 100        | 100       | 100     | 3.558.223.387  | 3.493.078.213  | 98,17       |
|     |                                                                                | 2. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPd      | 100        | 100       | 100     |                |                |             |
|     |                                                                                | 3. Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPd            | 100        | 100       | 100     |                |                |             |
| 2   | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi                               | 4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                     | 4          | 9         | 225     | 2.069.478.600  | 2.057.903.917  | 99,44       |
|     |                                                                                | 5. Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang termanfaatkan          | 2          | 2         | 100     | 287.072.516    | 281.547.538    | 98,08       |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            | 6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah    | BB (73,00) | A (80,05) | ≥ 100   | 14.319.772.397 | 13.671.808.708 | 95,48       |

## Penghargaan yang diterima

Tidak terdapat penghargaan yang diterima Bappeda Provinsi Gorontalo secara nasional pada tahun 2023.

# BAB IV

# PENUTUP

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, Bappeda Provinsi Gorontalo telah merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2023 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab III dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan dari 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, pencapaian target kinerjanya berada pada kategori Sangat Baik, namun demikian, beberapa hal perlu menjadi perhatian bagi perbaikan kinerja Bappeda kedepan diantaranya adalah :

1. Terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai keikutsertaan diklat teknis maupun fungsional atau wadah pengembangan lainnya;
3. Meningkatkan sarana pendukung operasional dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah;
4. Mengoptimalkan pengawasan/monitoring untuk perencanaan/kebijakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ke depan;
5. Perlu adanya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat di pertanggungjawabkan.
6. Perlunya membuat system pengukuran kinerja internal dalam mengetahui capaian kinerja organisasi perangkat daerah secara cepat dan tepat.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Bappeda Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Pembenahan dan penguatan SDM Perencana dan Peneliti
2. Memaksimalkan pengendalian dan evaluasi sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang.

Gorontalo,     Maret 2024

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo



Badriyanto Sidiki, S.Sos, M.Si

NIP. 19740311 199301 1 001

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
2. Pohon Kinerja dan Penjabaran (Cascading) Kinerja SKPD Terhadap Kinerja Kepala Daerah
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
4. Tabel Perencanaan Kinerja Hubungan Kinerja Tugas dan Fungsi
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
6. Rencana Kinerja Tahunan 2023
7. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
8. Crosscutting Bappeda Provinsi Gorontalo
9. SOP Pengukuran Target
10. LHE Sakip Tahun 2023
11. Tanggapan LHE Sakip Tahun 2023